

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Keberadaan perusahaan tidak dapat dipisahkan dengan laporan keuangan. Laporan keuangan tentu sudah menjadi kebutuhan utama bagi para *stakeholder*. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 1, laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka serta memuat informasi tentang perusahaan yang berguna dalam pengambilan keputusan.

Para *stakeholder* menghendaki adanya pengawasan terhadap perusahaan agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipercaya dan membantu untuk pengambilan keputusan. Jumlah informasi yang tersedia untuk pengambilan keputusan berkembang dengan cepat melalui basis data elektronik, internet, dan sumber-sumber lainnya. Informasi yang dibutuhkan pun harus dapat diandalkan, terpercaya, relevan, dan tepat waktu. Informasi dari laporan keuangan tidak hanya dibutuhkan oleh manajemen perusahaan itu sendiri, melainkan juga para investor, kreditor, dan bahkan masyarakat pada umumnya. Kebutuhan info tersebut

menimbulkan kesenjangan informasi antara *manajer* dan *stakeholder* mengenai keadaan posisi keuangan perusahaan yang sebenarnya, serta konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang terjadi antara manajer dan *stakeholder*. Dalam teori keagenan, terdapat pemisahan antara kepemilikan (*stakeholder/investor*) dengan pengendali (*agent/manajer*) (Jensen dan Meckling 1976).

Dewasa ini, teori keagenan merupakan landasan utama yang mewadahi aktivitas bisnis perusahaan, dimana hubungan keagenan ini mengatur kontrak antara manajer (*agent*) dengan pemilik maupun investor (*principal*). Jensen dan Meckling (1976) menitikberatkan pada aliran informasi yang terperinci dari *agent* kepada *principal*. Namun realisasi lapangan tidak sederhana, hal ini merujuk pada kepentingan antara dua pihak yang tidak selaras. Perbedaan kepentingan antara agen dengan prinsipal menjadi pemicu konflik yang biasa disebut sebagai masalah keagenan.

Mekanisme yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah agensi atau perbedaan kepentingan adalah dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Menurut Arifin dalam Hamzah (2013) tujuan penerapan *corporate governance* pada intinya adalah menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak tersebut adalah pihak internal yang meliputi dewan komisaris, direksi, karyawan dan pihak eksternal seperti investor, kreditur, pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan (*stakeholders*).

Dalam praktiknya, penerapan *corporate governance* berbeda pada setiap negara dan perusahaan karena berkaitan dengan sistem ekonomi, hukum, struktur kepemilikan, sosial dan budaya.

Ada empat mekanisme *corporate governance* yang sering dipakai dalam berbagai penelitian mengenai *corporate governance* yang bertujuan untuk mengurangi konflik keagenan, yaitu komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial. Dewan Komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan, terutama dalam pelaksanaan *corporate governance*. Untuk dapat bekerja secara efektif dalam suatu lingkungan usaha yang kompleks, dewan komisaris harus mendelegasikan beberapa tugas mereka kepada komite-komite.

Menurut FCGI (2002) menyatakan komite-komite dibentuk bertujuan untuk melaksanakan pekerjaan dewan komisaris secara lebih rinci dan memusatkan perhatian dewan komisaris kepada bidang khusus perusahaan atau pengawasan tata kelola perusahaan yang baik. Pada umumnya, komite tersebut adalah komite remunerasi dan komite audit. Namun pada prakteknya, disarankan bahwa anggota komite-komite tersebut diisi oleh komisaris independen.

Keberadaan komite audit berfungsi untuk membantu dewan komisaris dalam mengawasi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan (Mayangsari, 2004). Komite audit memiliki tugas terpisah dalam membantu dewan komisaris untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh. Salah satu tugas dari komite audit adalah menjaga keefektifan audit internal. Setiap audit internal melakukan perencanaan atau pelaporan, dan

hasilnya akan dievaluasi oleh komite audit. Audit internal sangat diperlukan bagi organisasi yang membutuhkan informasi dari pihak yang independen mengenai berbagai aktivitas organisasi guna pengambilan keputusan yang lebih obyektif dan *accountable*. Audit internal bertugas mengevaluasi kinerja pihak yang diaudit guna mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan, baik penyimpangan yang bersifat kepatuhan (*compliance*), inefisiensi, kecurangan (*fraud*), aktivitas, operasi, atau pekerjaan yang tidak efektif, serta laporan keuangan yang tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya (Aryani, 2010).

Secara tradisional, fungsi audit internal dirancang untuk melindungi aset perusahaan dan membantu menghasilkan informasi akuntansi yang handal untuk pembuatan keputusan tujuan (Gay dan Simnett dalam Aryani, 2010). Akan tetapi, audit internal saja tidak cukup untuk memberikan jaminan dari kualitas laporan keuangan perusahaan. Menurut Messier *et al.* (2006) kualitas audit yang baik dan andal memerlukan pihak yang Independen dan tidak punya hubungan sebagai karyawan perusahaan yang disebut auditor independen atau auditor eksternal.

Audit terhadap laporan keuangan oleh pihak ketiga yang independen (audit eksternal) dapat meningkatkan kualitas dari laporan keuangan yang telah dipertanggungjawabkan pihak manajemen dan dapat meningkatkan kualitas dari informasi keuangan tersebut sehingga investor akan mendapatkan nilai dari perdagangan sekuritas yang dilakukannya (Simunic, 1996). Dengan memeriksa opini yang dikeluarkan oleh akuntan publik, masyarakat dapat mengetahui perusahaan mana yang memiliki keadaan keuangan yang wajar dan tidak terdapat kecurangan dalam proses bisnisnya.

Secara umum, kantor akuntan publik (KAP) terdiri dari KAP *Big four* dan KAP *non Big four*. Perusahaan cenderung membandingkan keduanya dari segi independensi dan kualitas audit yang dihasilkan. KAP *Big four* dinilai lebih baik daripada KAP *non Big four* sehingga KAP *Big four* dinilai lebih mampu melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan serta memiliki kualitas audit yang baik dibandingkan dengan KAP *non Big four* (Kamal dan Yousef, 2016). Dalam memberikan opini atas laporan keuangan yang telah diaudit, akuntan publik harus mempertanggungjawabkan semua jasa audit yang telah dilakukan.

Akuntan publik merupakan jasa profesional, oleh sebab itu perusahaan wajib memberikan *fee* kepada akuntan publik atas jasa audit (auditor eksternal) terhadap laporan keuangannya. Bagi akuntan publik, *fee* adalah sumber pendapatan bagi mereka. Iskak dalam Suharli dan Nurlaelah (2008) mendefinisikan *fee* audit adalah honorarium yang dibebankan oleh akuntan publik kepada perusahaan *auditee* atas jasa audit yang dilakukan akuntan publik terhadap laporan keuangan. Masalah *fee* adalah suatu permasalahan yang dilematis, dimana di satu sisi auditor harus independen memberikan opininya tapi di sisi lain auditor juga memperoleh imbalan dari klien atas pekerjaan yang dilakukannya.

Terkait dengan *fee* audit, Pada tahun 2016, PT Timah (Persero) Tbk diduga memberikan laporan keuangan fiktif pada semester I 2015. Kegiatan laporan keuangan fiktif ini dilakukan guna menutupi kinerja keuangan PT Timah yang terus mengkhawatirkan. kondisi keuangan PT Timah sejak tiga tahun belakangan kurang sehat (dimulai dari 2013). Ketidakmampuan jajaran Direksi PT Timah keluar dari jerat kerugian telah mengakibatkan penyerahan 80%

wilayah tambang milik PT Timah kepada mitra usaha. (Soda,2016. Tambang.co.id, diakses pada 13 September 2018).

Pada tahun 2018, PT Bukopin melakukan *re-statement* laporan keuangan mereka selama 3 tahun berturut-turut karena *overstatement*. Pos-pos direvisi adalah posisi kredit, pendapatan berbasis komisi, pendapatan provisi dan komisi, dan jumlah kartu kredit berubah tidak semestinya. Selain itu, Bank Bukopin juga merevisi turun laba bersih 2016 menjadi Rp 183,56 miliar dari sebelumnya Rp 1,08 triliun. Permasalahan tersebut timbul ketika adanya temuan oleh internal Bukopin pada tahun lalu. Namun, KAP yang mengaudit Bank Bukopin, EY serta OJK luput dari pengawasan tersebut. Permasalahan mengenai restated (penyajian kembali) laporan keuangan 2016 merupakan temuan dari manajemen yang telah disampaikan kepada Kantor Akuntansi Publik untuk dilakukan restated pada laporan keuangan 2017 (Banjarnahor,2018 CNNINDONESIA.com diakses 1 September 2018).

Pada tahun 2018, Deloitte diduga melanggar standar audit profesional karena terdapat kesalahan mereka dalam mengaudit laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) Finance. Akuntan publik Marlinna dan Merliyana Syamsul yang merupakan partner Deloitte diduga belum menerapkan pemerolehan bukti audit yang cukup dan tepat atas akun piutang pembiayaan konsumen dan melaksanakan prosedur yang memadai terkait deteksi risiko kecurangan serta respons atas risiko kecurangan. Disamping itu, sistem pengendalian mutu akuntan publik tersebut mengandung kelemahan karena kedekatan antara personel senior (manajemen tim audit) dalam perikatan audit

pada klien yang sama untuk suatu periode yang cukup lama yang berdampak pada skeptisme profesional akuntan saat ini.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menjatuhkan sanksi administratif kepada KAP Deloitte serta akuntan publik Marlinna dan Merliyana Syamsul yang diketahui melakukan pelanggaran dalam prosedur audit atas laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) pada tahun buku 2012 hingga 2016. PT Bank Mandiri juga akan menggugat Deloitte karena gagal dalam data keuangan SNP yang sedang mengalami kesulitan. (Rika, 2018. CNNINDONESIA.com diakses 13 September 2018).

Dari beberapa kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor yang menjadi penyebab kecurangan adalah fungsi audit internal yang tidak memadai dalam mendeteksi kecurangan dan ketidaklengkapan data perusahaan serta pengawasan dari *stakeholders* yang akan berdampak terhadap resiko yang akan ditanggung auditor eksternal selama pengauditan. Perusahaan akan mengeluarkan biaya lebih untuk menutupi atau mendeteksi kecurangan yang terjadi pada perusahaan. Risiko yang dihadapi oleh auditor eksternal dalam mengaudit perusahaan juga akan berpengaruh terhadap *fee* yang akan mereka terima.

Penelitian Hay *et.al* (2006) menemukan bahwa terdapat hubungan antara audit internal dan *fee* audit. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi audit internal dianggap sebagai komplementer fungsi audit eksternal, yaitu untuk meningkatkan pengawasan perusahaan secara keseluruhan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Singh dan Newby (2009), Herawaty (2013), Hapsari (2013), serta Septyarini (2014). Berbeda dengan penelitian Felix *et.al*(2001) yang menyatakan

terdapat hubungan negatif signifikan hubungan antara fungsi audit internal terhadap *fee* audit. Hal ini timbul dari penilaian risiko audit yang lebih rendah karena keterlibatan audit internal dalam perusahaan. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Wibowo (2013), Suwaidan (2010), Serta Esti dan Prabowo (2008).

Penelitian Goodwin-Stewart dan Kent.P (2006) menemukan bahwa adanya hubungan antara *corporate governance* dengan *fee* audit yang berpengaruh positif signifikan karena tingkat independensi komite audit, keahlian dan frekuensi pertemuan komite audit yang tinggi juga menuntun pada tingkat jaminan yang lebih tinggi dalam keadaan ini akan meningkatkan biaya audit yang dibayarkan perusahaan. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Hay *et.al*(2008), dan Prayugi (2015) sedangkan pada penelitian Hamid dan Abdullah (2012) menemukan bahwa *fee* audit berhubungan positif signifikan dengan ukuran dewan. Namun, tidak berpengaruh signifikan terkait dengan variabel lain untuk perusahaan pemerintahan GLCs. Sehubungan dengan perusahaan non pemerintah NGLCs menunjukkan bahwa independensi dewan berhubungan positif signifikan terhadap *fee* audit. Sedangkan variabel lain yang ada berpengaruh negatif signifikan terhadap *fee* audit. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Adi Pratama *et.al* (2015), Widiyanti dan Prabowo (2008) serta Wibowo (2013).

Penelitian Sinaga dan Rachmawati (2018) menunjukkan bahwa variabel *status of the audit firm* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *fee audit* dengan kata lain semakin tinggi status kantor akuntan publik, akan menunjukkan semakin tingginya *fee audit*. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Kamal dan

Yousef (2016), Baldhaccino *et. al* (2014), dan Nugraha dan Sabeni (2013). Tetapi hal tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Rusmanto dan Remond (2014), tidak terdapat hubungan antara ukuran KAP dengan *fee* audit. Hal tersebut karena KAP di Indonesia melakukan pengukuran yang mudah terkait biaya audit terutama pada perusahaan yang tata kelola perusahaannya yang baik.

Berdasarkan fenomena diatas, kasus *fee* audit masih banyak terjadi dan menarik untuk diteliti ulang serta adanya ketidak konsistenan hasil yang terjadi pada penelitian-penelitian terdahulu. Populasi dari penelitian ini yaitu seluruh perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) karena penelitian tentang *fee audit* telah banyak diteliti diberbagai Negara seperti China, Australia, New Zealand, Hongkong, Iran dan Malta sehingga peneliti tertarik untuk meneliti seluruh sektor yang ada di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan penelitian yang sudah ada dan memeriksa pengaruh mekanisme *corporate governance*, fungsi audit internal dan ukuran KAP dengan *fee* auditor eksternal di Indonesia. Penting untuk mengetahui pengaruh mekanisme *corporate governance*, fungsi audit internal, dan ukuran KAP dan *fee* auditor eksternal. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Fungsi Audit Internal dan Ukuran KAP Terhadap Fee Audit Eksternal (Studi Empiris Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Terdapat *research gap* dari penelitian-penelitian sebelumnya mengenai hubungan antara fungsi audit internal, mekanisme *corporate governance*, dan ukuran KAP terhadap *fee* audit eksternal seperti yang telah dijabarkan pada latar belakang penulisan penelitian. Adapun rumusan masalah terkait pada penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat pengaruh proposi komisaris independen terhadap *fee* audit eksternal?
2. Apakah terdapat pengaruh komite audit terhadap *fee* audit eksternal?
3. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan institusional terhadap *fee* audit eksternal?
4. Apakah terdapat pengaruh fungsi audit internal dengan *fee* audit eksternal?
5. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *fee* audit eksternal?
6. Apakah terdapat pengaruh ukuran KAP terhadap *fee* audit eksternal?

1.3 Ruang lingkup / batasan penelitian

Agar lebih jelas dan terarah, maka penulis perlu membatasi masalah yang akan dibahas dan diteliti. Berdasarkan dari latar belakang masalah maka batasan masalah dalam penelitian ini yaitu :

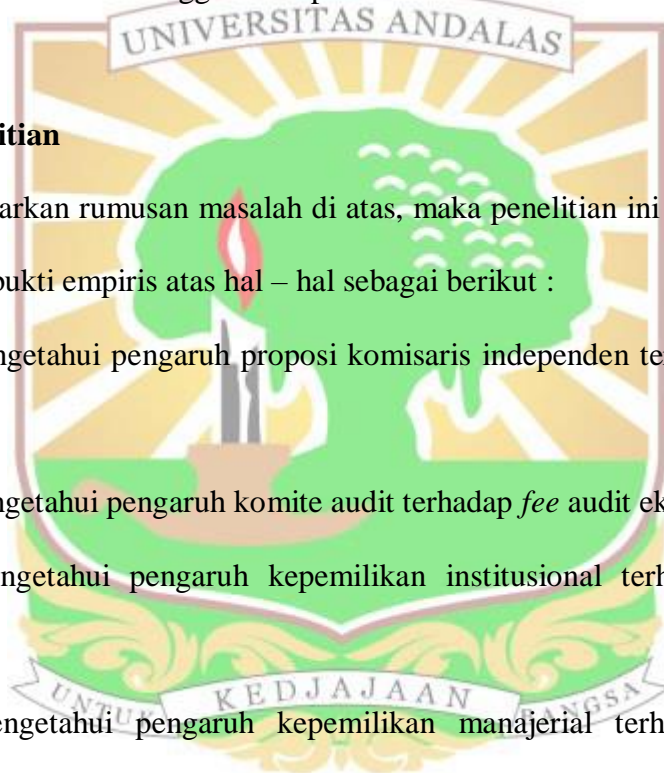
1. Mengingat banyaknya jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, maka penulis melakukan pemilahan jumlah sampel yang akan di uji sesuai kriteria yang ada.

2. Data penelitian yang digunakan adalah data dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dan tergantung pada jumlah sampel yang memiliki kriteria untuk diteliti
3. Data yang diteliti seluruhnya merupakan data sekunder.
4. Alat bantu yang digunakan untuk menganalisa data statistik agar dapat diolah, ditampilkan, dan dimanipulasi sehingga dapat menyajikan suatu informasi dalam penelitian ini menggunakan peranti lunak atau software SPSS.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bukti empiris atas hal – hal sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh proposi komisaris independen terhadap *fee* audit eksternal.
2. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap *fee* audit eksternal.
3. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap *fee* audit eksternal.
4. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *fee* audit eksternal.
5. Untuk mengetahui pengaruh fungsi audit internal terhadap *fee audit* eksternal.
6. Untuk mengetahui pengaruh ukuran KAP berpengaruh terhadap *fee* audit eksternal.



1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan tambahan bagi akademisi, pihak-pihak yang terkait dan juga bagi penulis sendiri.

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis, Memperoleh pemahaman tambahan dan lebih mengenal pengaruh fungsi audit internal, struktur *corporate governance* dan ukuran KAP terhadap *fee* audit eksternal.
2. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan teori dan tambahan literature mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *fee* audit eksternal dalam lingkungan pengauditan.
3. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, wawasan serta pemahaman bagi para auditor internal atau para praktisi akuntansi atau akuntan profesional tentang hubungan antara fungsi audit internal terhadap *fee* audit eksternal.

1.6 Sistematika penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini yaitu Bab I, pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II, landasan teori dan kerangka pemikiran yang retmenguraikan tentang landasan teori, pengembangan hipotesis dan kerangka pemikiran. Bab III, metode penelitian yang menguraikan tentang desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, data dan metode pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional dan metode analisis data. Bab IV, hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan tentang deskripsi data,

gambaran data secara statistik, analisis data, dan pembahasan untuk masing-masing variabel. Bab V, penutup yang menguraikan tentang kesimpulan yang diperoleh setelah dilakukan, serta keterbatasan dalam penelitian dan saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

